

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 21 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (halaman 13)	Kamis, 21 Maret 2019	Peluang Swasta di Infrastruktur Makin Terbuka	Peluang swasta untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah dinilai makin terbuka dengan adanya skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Namun, perlu modal dan teknologi yang cukup karena pengembalian investasinya dalam jangka panjang. Chief Executive Officer PT Nusantara Infrastructure Tbk, M Ramdani Basri dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Skema KPBU yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3/2019), menyatakan meski KPBU sudah diluncurkan lebih dari 10 tahun lalu, proyek yang ditawarkan pemerintah tidak serta-merta berjalan. Masalahnya adalah ketidaksiapan pendanaan. Proyek infrastruktur butuh modal besar, sementara pengembalian investasinya dalam jangka Panjang.
2	Bisnis Indonesia (halaman 3)	Kamis, 21 Maret 2019	Pemenang Lelang Ditarget Juni	Perum Jasa Tirta II memperkirakan proses lelang perusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur bisa menghasilkan pemenang pada Juni 2019. Proyek ini bakal menjadi salah satu proyek air minum dengan kapasitas terbesar di Indonesia.
3	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Kamis, 21 Maret 2019	Cegah Korupsi, PUPR Bentuk Balai Baru	Untuk menutup celah terjadinya korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Balai Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Konstruksi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, sesuai Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (20/3), mengatakan bahwa diperlukan konsolidasi terhadap adanya reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus korupsi. "Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi yang tentu di dalamnya ada SDM (sumber daya manusia), ada sistem, ini semua dikonsolidasikan,"ujarnya.

Judul	Peluang Swasta di Infrastruktur Makin Terbuka	Tanggal	Kamis, 21 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 13)		
Resume	Peluang swasta untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah dinilai makin terbuka dengan adanya skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Namun, perlu modal dan teknologi yang cukup karena pengembalian investasinya dalam jangka panjang. Chief Executive Officer PT Nusantara Infrastructure Tbk M Ramdani Basri dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Skema KPBU yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3/2019), menyatakan meski KPBU sudah diluncurkan lebih dari 10 tahun lalu, proyek yang ditawarkan pemerintah tidak serta-merta berjalan. Masalahnya adalah ketidaksiapan pendanaan. Proyek infrastruktur butuh modal besar, sementara pengembalian investasinya dalam jangka Panjang.		

TRANSPORTASI

Peluang Swasta di Infrastruktur Makin Terbuka

JAKARTA, KOMPAS — Peluang swasta untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah dinilai makin terbuka dengan adanya skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Namun, perlu modal dan teknologi yang cukup karena pengembalian investasinya dalam jangka panjang.

Chief Executive Officer PT Nusantara Infrastructure Tbk M Ramdani Basri dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Skema KPBU yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3/2019), menyatakan, meski KPBU sudah diluncurkan lebih dari sepuluh tahun lalu, proyek yang ditawarkan pemerintah tidak serta-merta berjalan. Masalahnya adalah ketidaksiapan pendanaan. Proyek infrastruktur butuh modal besar, sementara pengembalian investasinya dalam jangka panjang.

Saat ini pembangunan jalan tol menjadi salah satu jenis proyek infrastruktur dengan skema KPBU paling maju. "KPBU harus dilakukan karena kemampuan pendanaan dari APBN

Swasta perlu dilibatkan semakin banyak dalam proyek infrastruktur transportasi pemerintah.

Erwin Aksa

ataupun BUMN sudah mencapai batas. Kuenya besar, swasta mulai siap, tetapi belum banyak," kata Ramdani.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyatakan, 55 persen (Rp 273 triliun) biaya 48 proyek jalan tol yang sedang jalan bersumber dari utang, sementara dari ekuitas 38 persen (Rp 187 triliun) dan dukungan pemerintah 7 persen (Rp 36 triliun). Bank-bank pemerintah menjadi kreditor atau pemberi pinjaman terbesar.

Menurut Danang, perencanaan jalan tol ke depan mesti mengikutsertakan pembangunan kawasan, seperti kawasan industri dan properti. Pembangunan Tol Trans-Sumatera

yang dibangun dengan skema penugasan, misalnya, mesti melibatkan banyak pihak, terutama swasta.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, swasta perlu dilibatkan semakin banyak dalam proyek infrastruktur transportasi pemerintah. Namun, mekanismenya perlu diperjelas, termasuk tantangan dan hambatan.

Kereta api

Peran kereta api dalam angkutan orang dan barang dinilai masih kecil meski keberadaannya berpotensi menghemat biaya logistik. Selain infrastruktur yang terbangun belum banyak, ada biaya penanganan ganda (*double handling*) yang timbul sehingga ongkosnya menjadi tidak efisien.

"Penghematan peralihan angkutan barang dari jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp 3,5 triliun per tahun per satu juta TEU (unit ekuivalen 20 kaki) peti kemas," kata Ketua Masyarakat Kereta Api (Maska) Hermanto Dwiatmoko dalam Indonesia Railway Con-

ference di Jakarta, Rabu.

Penanganan ganda timbul karena barang masih harus dibawa dengan truk dari pabrik ke stasiun. Menurut Hermanto, untuk membuat angkutan kereta lebih murah, antara lain bisa ditempuh dengan menghapus pajak pertambahan nilai.

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menyebutkan, sektor transportasi Indonesia tahun 2018 didominasi subsektor angkutan darat (jalan) dengan kontribusi 53,15 persen dan diikuti angkutan udara 36,10 persen. Kontribusi angkutan lain lebih rendah, yakni laut 6,77 persen; sungai, danau, dan penyeberangan 2,41 persen; dan angkutan rel 1,57 persen.

Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Yudi Karyanto mengatakan, Kementerian Perhubungan sedang membangun banyak infrastruktur perkeretaapian. Tidak hanya dengan dana APBN, pembangunannya juga menggunakan skema KPBU, yakni di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. (NAD/ARN)

Judul	Pemenang Lelang Ditarget Juni	Tanggal	Kamis, 21 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 3)		
Resume	Perum Jasa Tirta II memperkirakan proses lelang pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur bias menghasilkan pemenang pada Juni 2019. Proyek ini bakal menjadi salah satu proyek air minum dengan kapasitas terbesar di Indonesia.		

► **PROYEK AIR MINUM JATILUHUR**

Pemenang Lelang Ditarget Juni

Bisnis, PURWAKARTA — Perum Jasa Tirta II memperkirakan proses lelang pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur bisa menghasilkan pemenang pada Juni 2019.

► Se jauh ini terdapat empat PDAM yang menjadi *oftaker* dalam proyek SPAM Jatiluhur.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Proyek ini bakal menjadi salah satu proyek air minum dengan kapasitas terbesar di Indonesia.

Direktur Keuangan dan SDM Perum Jasa Tirta II Haris Zulkarnain mengatakan, perseroan sedang menyiapkan permintaan penawaran atau *request for proposal* (RFP), menyusul tahap prakualifikasi yang sudah menghasilkan empat kandidat.

Menurut dia, proses lelang akan segera dibuka berbarengan dengan penyelesaian masa RFP. Penetapan pemenang diharapkan bisa berlangsung 3 bulan setelah lelang dimulai atau sekitar Juni 2019.

Haris mengemukakan bahwa saat ini perseroan merampungkan proses pemberian komitmen penjaminan dari pemerintah. Selain itu, lanjutnya, perseroan selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJK) memerlukan dukungan penjaminan dari pemerintah agar proyek tersebut bisa bergulir.

Namun, dia juga menekankan, adanya sejumlah aspek risiko seperti risiko terminasi dan risiko gagal bayar yang tidak bisa ditanggung perseroan, karena keterbatasan kapasitas keuangan.

Dalam hal risiko terminasi, misalnya dengan angka maksimum Rp1,9 triliun tidak bisa ditanggung perseroan, karena melampaui aset Perum Jasa Tirta II sebesar Rp1,4 triliun.

"Karena kapasitas keuangan tidak cukup, kami minta dukungan pemerintah untuk penjaminan," jelasnya kepada *Bisnis* di Jatiluhur, Purwakarta, Rabu (20/3).

Sebagaimana diketahui, saat ini empat peserta sudah dinyatakan lulus tahap prakualifikasi dalam proyek SPAM Jatiluhur. Keempat peserta tersebut adalah PT Adaro Tirta Mandiri, konsorsium PT PP Tbk-PT Jakarta Propertindo, konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk-PT Wijaya Karya Tbk-PT Tirta Gemah Ripah, dan konsorsium PT Aetra Air Jakarta-PT Moya Indonesia.

Haris mengungkapkan bahwa pihaknya juga menargetkan penyelesaian perjanjian kerja sama dengan para PDAM yang menjadi pembeli air baku atau *oftaker*.

Perjanjian tersebut diperlukan karena, menurut dia, *oftaker* harus berkomitmen untuk membangun infrastruktur saluran air. Sebelumnya, Perum Jasa Tirta II sudah menyepakati tarif penyerapan air baku sebesar Rp3.200 per meter kubik dengan para *oftaker*.

Sejauh ini terdapat empat PDAM yang menjadi *oftaker* dalam proyek SPAM Jatiluhur, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, dari total kapasitas 5.000 liter per detik (lpd), sebanyak 4.000 lpd akan didistribusikan ke wilayah Jakarta. Sementara itu, sisanya akan disalurkan ke ke Kabupaten Bekasi dan Karawang sebanyak 350 lpd dan 300 lpd untuk wilayah Kota Bekasi.

Di lain pihak, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII berharap penjaminan proyek SPAM Jatiluhur I bisa berlangsung tahun ini.

Sebelumnya, Direktur Utama PII Armand Hermawan mengatakan bahwa SPAM Jatiluhur merupakan 1 dari 6 proyek infrastruktur yang ditargetkan bisa dijamin perseroan sepanjang 2019.

Sebelum SPAM Jatiluhur, PII sudah memberikan penjaminan untuk tiga proyek air minum, yaitu SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Semarang Barat.

SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung sudah memulai konstruksi, sedangkan SPAM Semarang Barat sudah menetapkan pemenang, yaitu PT Air Semarang Barat, perusahaan patungan Moya Indonesia dan Medco. ■

Profil SPAM Jatiluhur I

Biaya investasi: **Rp4 triliun*** | Tarif air curah: **Rp3.200/m³**** | Total kapasitas tampung: **5.000 liter/detik**

Rencana konstruksi: **2019** | Rencana pengumuman pemenang: **Juni 2019**

Pembeli: **Kabupaten Karawang, Kabupaten & Kota Bekasi, DKI Jakarta**

Peserta lulus prakualifikasi

1. PT Adaro Tirta Mandiri
2. Konsorsium PT PP (Persero) Tbk. & PT Jakarta Propertindo
3. Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. & PT Tirta Gemah Ripah
4. Konsorsium PT Aetra Air Jakarta & PT Moya Indonesia

Sumber: Kementerian PUPR, Perum Jasa Tirta II, diolah
*Tidak termasuk pemangangan distribusi di JDI,
**belum termasuk biaya overhead

DISINI/IRI UTOMO



Judul	Cegah Korupsi, PUPR Bentuk Balai Baru	Tanggal	Kamis, 21 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Untuk menutup celah terjadinya korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Balai Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Konstruksi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, sesuai Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (20/3), mengatakan bahwa diperlukan konsolidasi terhadap adanya reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus korupsi. "Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi yang tentu di dalamnya ada SDM (sumber daya manusia), ada system, ini semua dikonsolidasikan," ujarnya.		



Bisnis, JAKARTA — Untuk menutup celah terjadinya korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Balai Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal Konstruksi.

Krizia P. Kinanti
krizia.pupr@bisnis.com

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, sesuai Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (20/3), mengatakan bahwa diperlukan konsolidasi terhadap adanya reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus korupsi.

"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi yang tentu di dalamnya ada SDM [sumber daya manusia],

ada sistem, ini semua dikonsolidasikan," ujarnya.

Syarif mengatakan bahwa selain melakukan konsolidasi, terdapat serah terima antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) lama dan ULP baru yang namanya diubah menjadi Balai Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebelum balai khusus ini terbentuk, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengerjakan empat tugas secara bersamaan, mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan pemisahan balai pekelangan dari Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat memperkecil ruang korupsi di

lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu, pembentukkan Balai Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, bersaing, dan akuntabel.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengidentifikasi ada 20 proyek yang diduga terdapat praktik suap terhadap pejabat di lingkungan kementerian PUPR.

Menurut Syarif, di dalam rapat koordinasi itu juga terdapat tiga narasumber yang dapat memberi wawasan kepada para peserta yang hadir.

"Di dalam rapat ini ada tiga narasumber yang bisa memberi wawasan yakni KPK, Kejaksaan, dan LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]. Intinya tentu dalam rangka melakukan pengadaan barang dan jasa secara aturan."

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa indikasi dugaan korupsi di sejumlah proyek pembangunan sistem penyediaan air minum berada di bagian pengadaan

barang dan jasa.

Menurut Basuki, dari survei KPK diketahui bahwa 70% penyelewengan ada di pengadaan barang dan jasa.

BELANJA MODAL

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atnaswidjaja mengatakan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp110,73 triliun.

"Nilai anggaran Rp110,73 triliun, belanja modalnya 78% dan 8.777 paket di LPSE [lelang pengadaan secara elektronik] ya," ujarnya.

Menurut Endra, sebanyak 8.777 paket ini bisa lebih besar karena terdapat beberapa paket yang belum didaftarkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

"[Sebanyak] 8.777 paket ini yang sudah di LPSE yang sudah jadi kontrak atau dilelang walaupun belum ada penetapan pemenangnya," ujarnya.

Apabila diperinci, belanja modal dan

► Sebelum balai khusus terbentuk, Ditjen Cipta Karya mengerjakan empat tugas secara bersamaan.

► Dalam RAPBN 2019, anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR adalah Rp110,73 triliun.

belanja barang berkarakter belanja modal Kementerian PUPR pada 2019 berjumlah 84,60%.

Untuk tahun ini dengan pagu anggaran Rp 110,73 triliun, komposisinya terdiri atas belanja modal 68,40%, belanja barang berkarakter belanja modal 16,20%, belanja busang biasa 13,10%, dan belanja pegawai 2,30%.

Belanja barang yang bersifat belanja modal adalah pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang hasilnya nanti akan diserahkan kepada masyarakat seperti program Padat Karya Tunai untuk pembangunan irigasi kecil, jalan produksi, sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), dan rumah swadaya.

Adapun, untuk program pengelolaan sumber daya air dialokasikan Rp39,70 triliun, penyelenggaraan jalan dan jembatan Rp40,30 triliun, pengembangan infrastruktur permukiman Rp20,20 triliun, dan pengembangan perumahan Rp8,10 triliun, serta manajemen perencanaan dan pengawasan Rp2,40 triliun. **■**